



AMBYAR!

UTANG RI NYARIS RP 8.000 T MAMPUKAH TERBAYAR?

GOVERNMENT (Hal.2)
Upah Tak Naik 15%,
Buruh Ancam Mogok
Nasional

UTANG

PERJALANAN UTANG PEMERINTAH DARI AWAL TAHUN 2023 HINGGA SAAT INI



Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2023 nyaris menyentuh Rp 8.000 triliun, atau tepatnya mencapai Rp 7.950,52 triliun. Jumlah utang itu naik Rp 58,91 triliun dari posisi akhir September 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun. Kalangan pengamat pun mengingatkan ancaman crowding out effect, yaitu uang buat sektor riil tersedot ke pemerintah. Hal inipun akhirnya akan berbuntut menjadi fenomena debt overhang atau overhang utang. Bahkan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui mulai mengkhawatirkan makin keringnya likuiditas. Jokowi mengingatkan makin tipisnya peredaran uang bisa mengganggu sektor riil. Yang dibenarkan oleh pengusaha, di mana dikhawatirkan akan memicu efek domino hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

(Baca Hal 11)

POSISI UTANG INDONESIA

PER 31 OKTOBER 2023

RP 7.950,52

Debt to GDP
37,68%

Surat berharga Negara
RP 7.048,90

Domestik RP 5.677,55
- Surat Utang Negara Rp 4.607,52
- Surat Berharga Syariah Negara Rp 1.070,02

Valas RP 1.371,35
- Surat Utang Negara Rp 1.054,60
- Surat Berharga Syariah Negara Rp 316,75

Pinjaman
RP 901,62

Pinjaman Dalam Negeri RP 29,52
Pinjaman Luar Negeri RP 872,09

(Dalam Triliun Rupiah)

Upah Tak Naik 15%, Buruh Ancam Mogok Nasional



Sejumlah buruh menggunakan sepeda motor saat aksi di kawasan MM 2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023).ant

JAKARTA-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan, Kamis (30/11/2023) merupakan batas hari terakhir bagi Gubernur se-Indonesia untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024. Dalam surat nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tertanggal 15 November 2023, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum 2024 sesuai dengan PP No.51/2023. Dalam beleid itu, gubernur diwajibkan menetapkan dan mengumumkan UMP paling lambat 21 November dan 30 November untuk UMK. Penetapan upah ini mulai berlaku 1 Januari pada tahun berikutnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan para buruh melakukan aksi mogok nasional, Kamis (30/11/2023). Dia menuturkan Partai Buruh dan KSPI menuntut revisi penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 naik mendekati 15 persen, salah satunya di DKI Jakarta. "Tuntutan dari Partai Buruh dan KSPI hanya satu yaitu naikan upah UMK mendekati 15 persen atau Pj Gubernur tidak menurunkan nilai kenaikan UMK yang sudah direkomendasi oleh Pj Bupati atau walikota," kata Said, Kamis (30/11/2023).

Dia menuturkan para buruh di Jakarta akan meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi kenaikan UMP DKI 2024 sebesar 3,38 persen menjadi 15 persen. "Tidak masuk akal DKI naik upah sebesar 3,6 persen sementara di daerah sekitarnya jauh melebihi dari 3,6 persen. Seperti di Kota Bekasi 14,02 persen, Kab. Bekasi 13,99

persen, Kota Depok 12,99 persen, dan lainnya, sehingga UMP DKI tidak boleh lebih rendah dari Jabodetabek," kata Said.

Tidak hanya di Jakarta, Sadi menuturkan aksi mogok akan dilakukan jutaan buruh dan dilakukan di beberapa kota industri di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kep. Riau. Kemudian, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan daerah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Papua).

"Aksi Mogok Nasional Awalan akan melakukan stop produksi sehingga melumpuhkan 100 titik di kabupaten/kota industri. Dengan 2 tuntutan yakni Revisi UMP DKI dari 3,6 persen mendekati 15 persen dan berlakukan UMK sesuai dengan rekomendasi dari Bupati dan Wali kota sebesar 10 sampai 14,2 persen," kata dia. Lebih lanjut, dia menuturkan mogok nasional akan terus berlanjut jika tuntutan belum terpenuhi.

Sementara itu, dia mengimbau agar seluruh buruh tertib dan damai dalam menyampaikan tuntutan. "Kalau gubernur nekat untuk mengubah dan tidak menetapkan sesuai rekomendasi yang ada, maka kita bisa lakukan Mogok Nasional Lanjutan," ungkap Said.

Jateng-Jabar Resmi Tetapkan UMK

Diketahui, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mengumumkan UMK. Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dalam keterangannya mengatakan, "Dengan memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Data yang

digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data dari lembaga berwenang, yaitu BPS," ujar Nana dalam keterangannya, Kamis (30/11/2023).

UMK tertinggi tercatat dari Kota Semarang sebesar 3.243.969. Besaran UMK ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Nana mengatakan, penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B - M / 2 4 3 / H I . 0 1 . 0 0 / X I / 2 0 2 3 t e n t a n g Penetapan Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Nana menjelaskan, UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. "Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah," kata Nana.

Senada, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin telah menandatangani keputusan Gubernur terkait besaran UMK tahun 2024. Hasilnya, PP nomor 51 2023 tetap menjadi pedoman kenaikan UMK di 27 Kota Kabupaten (Kokab) di Jawa Barat.

"Saya juga sudah menerima perwakilan dari serikat pekerja, sudah disetujui tetap pakai PP nomor 51 tahun 2023 itu yang menjadi dasar kami dan kami hanya bisa di koridor itu," kata Bey di Gedung Sate, Kamis (30/11/2023).

Bey mengaku, ada 14 Kokab yang menyarankan besaran UMK di atas PP nomor 51. Namun, Pemprov Jabar tetap mempertimbangkan besaran UMK akan tetap naik meski harus sesuai PP nomor 51. Kenaikan tertinggi Bekasi 5.343.430 tahun lalu Jabar UMK range 2-5 juta, terendah Kota Banjar Rp2.070.192. Hal ini berbeda dengan tahun lalu, Karawang kini menjadi peringkat nomor 2 UMK tertinggi di Jabar.

"Kenaikan tiap daerah berbeda-beda sesuai karakter dan batas UMK. Saya berharap karena sudah diputuskan, kita patuhi bersama dan memang hasil hari ini adalah yang kami bisa maksimal perbuat. Sudah diformulasi dan sudah cukup untuk kami menetapkan UMK hari ini," ucapnya.

Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Tahun 2024 dengan nilai upah tertinggi di Kota Yogyakarta

sebesar Rp2.492.997,00.

Upah Minimum Kabupaten/Kota 2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 396/Kep/2023 itu disampaikan oleh Sekda DIY Beny Suharsono di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis. "Seluruh hasil penghitungan upah minimum kabupaten/kota di DIY besarnya sudah lebih tinggi atau di atas besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY," ujar dia. (wid,rls,ist/dya)

UMK 2024 DI KABUPATEN/ KOTA JAWA TENGAH:

● Kabupaten Cilacap :	Rp. 2.479.106
● Kabupaten Banyumas :	Rp 2.195.690
● Kabupaten Purbalingga :	Rp 2.195.571
● Kabupaten Banjarnegara :	Rp 2.038.005
● Kabupaten Kebumen :	Rp 2.121.947
● Kabupaten Purworejo :	Rp 2.127.641
● Kabupaten Wonosobo :	Rp 2.159.175
● Kabupaten Magelang :	Rp 2.316.890
● Kabupaten Boyolali :	Rp 2.250.327
● Kabupaten Klaten :	Rp 2.244.012
● Kabupaten Sukoharjo :	Rp 2.215.482
● Kabupaten Wonogiri :	Rp 2.047.500
● Kabupaten Karanganyar :	Rp 2.288.366
● Kabupaten Sragen :	Rp 2.049.000
● Kabupaten Grobogan :	Rp 2.116.516
● Kabupaten Blora :	Rp 2.101.813
● Kabupaten Rembang :	Rp 2.099.689
● Kabupaten Pati :	Rp 2.150.000
● Kabupaten Kudus :	Rp 2.516.888
● Kabupaten Jepara :	Rp 2.450.915
● Kabupaten Demak :	Rp 2.761.236
● Kabupaten Semarang :	Rp 2.582.287
● Kabupaten Temanggung :	Rp 2.109.690
● Kabupaten Kendal :	Rp 2.613.573
● Kabupaten Batang :	Rp 2.379.702
● Kabupaten Pekalongan :	Rp 2.334.886
● Kabupaten Pemalang :	Rp 2.156.000
● Kabupaten Tegal :	Rp 2.191.161
● Kabupaten Brebes :	Rp 2.103.100
● Kota Magelang :	Rp 2.142.000
● Kota Surakarta :	Rp 2.269.070
● Kota Salatiga :	Rp 2.378.951
● Kota Semarang :	Rp 3.243.969
● Kota Pekalongan :	Rp 2.389.801
● Kota Tegal :	Rp 2.231.628

UMK 2024 DI KABUPATEN/ KOTA JAWA BARAT

● Kota Bekasi :	Rp5.343.430
● Kabupaten Karawang :	Rp5.257.834
● Kabupaten Bekasi :	Rp5.219.263
● Kabupaten Purwakarta :	Rp4.499.768
● Kabupaten Subang :	Rp3.294.485
● Kota Depok :	Rp4.878.612
● Kota Bogor :	Rp4.813.988
● Kabupaten Bogor :	Rp4.579.541
● Kabupaten Sukabumi :	Rp3.384.491
● Kabupaten Cianjur :	Rp2.915.102
● Kota Sukabumi :	Rp2.834.399
● Kota Bandung :	Rp4.209.309
● Kota Cimahi :	Rp3.627.880
● Kabupaten Bandung Barat :	Rp3.508.677
● Kabupaten Sumedang :	Rp3.504.308
● Kabupaten Bandung :	Rp3.527.967
● Kabupaten Indramayu :	Rp2.623.697
● Kota Cirebon :	Rp2.533.038
● Kabupaten Cirebon :	Rp2.517.730
● Kabupaten Majalengka :	Rp2.257.871
● Kabupaten Kuningan :	Rp2.074.666
● Kota Tasikmalaya :	Rp2.630.951
● Kabupaten Tasikmalaya :	Rp2.535.204
● Kabupaten Garut :	Rp2.186.437
● Kabupaten Ciamis :	Rp2.089.464
● Kabupaten Pangandaran :	Rp2.086.126
● Kota Banjar :	Rp2.070.192

Gugatan Masa Jabatan DPR, DPD dan DPRD Dibatasi 2 Periode Ditolak



(Ilustrasi) MK tak dapat menerima gugatan anggota DPR, DPRD dan DPD RI cuma 2 periode. (ant)

JAKARTA- Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materiil yang ingin anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya dibatasi dua periode.

Permohonan itu tercatat dengan nomor 98/PUU-XXI/2023 yang diajukan mahasiswa, Andi Redani Suryanata. Dia menguji Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu terkait masa jabatan anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan kesimpulan bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. "Menyatakan permohonan tidak dapat diterima," ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MKRI, Jakarta, dikutip Kamis (30/11/2023).

Dalam salah satu pertimbangannya, mahkamah menilai norma pada kedua pasal yang diuji itu baru dapat dinilai telah merugikan atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon apabila menghalangi hak Pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Kendati demikian, mahkamah berpendapat persyaratan yang termaktub dalam kedua norma pasal tersebut tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk diajukan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, dan DPD.

Karenanya, syarat dalam kedua pasal itu dinilai termasuk syarat personal yang melekat pada individu yang akan mencalonkan diri atau diajukan sebagai calon. Pemohon pun dinilai telah terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan adanya

kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 182 dan Pasal 240 ayat (1) UU 7/2017.

Perkara ini didaftarkan ke MK pada 6 Agustus 2023 silam. Setelahnya, sidang pemeriksaan pendahuluan digelar pada 11 September. Lalu, pada 25 September terdapat sidang perbaikan permohonan. Hingga akhirnya MK membaca putusannya pada sidang pengucapan putusan pada 29 November.

"Menyatakan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga "tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPD selama dua periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," demikian bunyi petitum yang diajukan pemohon.

"Menyatakan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk juga "tidak pernah memegang jabatan sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota selama dua periode dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," bunyi petitum lainnya.

MK Juga Putuskan Masa Jabatan Hakim

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menutup peluang utak-atik komposisi hakim melalui upaya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK dengan mengubah masa jabatan dan syarat

usia minimal hakim konstitusi. Dalam putusan 81/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Rabu (29/11/2023), MK menegaskan bahwa revisi masa jabatan maupun syarat usia minimal hakim konstitusi tak dapat dikenakan untuk hakim yang tengah menjabat.

"Manakala ketentuan mengenai persyaratan dan masa jabatan diubah dan diberlakukan langsung kepada mereka yang sedang menjabat, maka dapat dikatakan perubahan demikian berdampak kepada yang sedang menjabat," kata hakim konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan, dalam siaran sidang yang dikutip pada Kamis (30/11/2023).

MK mengingatkan semangat Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dalam setiap perubahan hukum. Perubahan aturan, termasuk UU MK, tidak boleh merugikan subyek yang menjadi adresat (subyek hukum) dari substansi perubahan UU yang dimaksud. "Dalam kaitannya dengan dampak dari suatu perubahan undang-undang yang demikian, UU Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan jaminan atau perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahna.

Dalam putusan yang sama, MK juga menegaskan bahwa terlalu seringnya mengubah syarat usia dan masa jabatan hakim konstitusi dapat dipandang sebagai upaya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman. MK mengamini, penentuan batasan usia bagi jabatan publik merupakan wilayah pembentuk undang-undang, namun kebijakan hukum terbuka semacam itu tetap bisa dibatasi.

Sebelumnya diberitakan, DPR kembali menyampaikan usulan revisi periode masa jabatan hakim MK melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR pada Rabu (24/5/2023) kemarin. Salah satu substansi yang hendak diubah adalah masa jabatan hakim konstitusi dari semula maksimal 15 tahun atau hingga berumur 70 tahun dikembalikan menjadi 5 tahun. Untuk hakim yang sedang menjabat, dikembalikan ke lembaga pengusul untuk menentukan nasibnya melalui permintaan konfirmasi.

Selain masa jabatan, usia minimal hakim konstitusi juga dikhawatirkan hendak diubah dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Ada tiga hakim konstitusi yang usianya belum mencapai 60 tahun, yaitu Guntur Hamzah, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Padahal, UU MK sudah 3 kali direvisi, dan semua revisi itu selalu mengutak-atik usia dan periode jabatan hakim. Revisi pertama adalah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Setelah itu dilakukan revisi kedua melalui UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013. Namun, kemudian dibatalkan karena membatasi kewenangan MK. Ketiga adalah revisi UU MK melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Isu yang mengemuka dalam 3 revisi UU itu hanya berkuat pada persoalan usia minimum, masa jabatan hakim MK, hingga kode etik. Perubahan masa jabatan hakim MK dari setiap revisi itu juga mulai dari 5 tahun, 10 tahun, lalu diubah menjadi 15 tahun. Kini DPR dan pemerintah justru hendak kembali mengubah masa jabatan seorang hakim MK kembali menjadi 10 tahun dalam satu kali periode. (wid,rls,ist/dya)

BESARAN GAJI POKOK ANGGOTA DPR BESERTA TUNJANGANNYA

Gaji Pokok

- Gaji pokok Ketua DPR sejumlah Rp 5.040.000,
- Gaji pokok Wakil Ketua DPR sebesar Rp 4.620.000,

Tunjangan yang didapat meliputi:

- Uang sidang/paket sebesar Rp 2.000.000.
- Asisten anggota Rp 2.250.000.
- Tunjangan beras sebesar Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok untuk:
 - a. Anggota DPR Rp 420.000 per bulan.
 - b. Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 462.000 per bulan.
 - c. Anggota DPR merangkap Ketua Rp 504.000 per bulan.

Tunjangan untuk dua anak sebesar 2% dari gaji pokok anggota DPR RI untuk:

- Anggota DPR Rp 168.000 per bulan.
- Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 184.000 per bulan.
- Anggota DPR merangkap Ketua Rp 201.600 per bulan.
- Tunjangan jabatan Anggota DPR RI:
 - a. Tunjangan jabatan Anggota DPR Rp 9.700.000 per bulan.
 - b. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 15.600.000 per bulan.
 - c. Tunjangan jabatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 18.900.000 per bulan.

Tunjangan kehormatan anggota DPR RI:

- Tunjangan kehormatan Anggota DPR Rp 5.580.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 6.450.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan Anggota DPR merangkap Ketua Rp 6.690.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR RI:
 - a. Tunjangan komunikasi Anggota DPR Rp 15.554.000 per bulan.
 - b. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Wakil Ketua Rp 16.009.000 per bulan.
 - c. Tunjangan komunikasi Anggota DPR merangkap Ketua Rp 16.468.000 per bulan.
 - d. Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000

Biaya perjalanan harian:

- Uang harian daerah tingkat I (per hari) Rp 5.000.000.
- Uang harian daerah tingkat II (per hari) Rp 4.000.000.
- Uang representasi daerah tingkat I (per hari) Rp 4.000.000.
- Uang representasi daerah tingkat II (per hari) Rp 3.000.000.

DPRD Jatim Ajukan Tiga Nama Calon Pj Gubernur Jatim Pengganti Khofifah

SURABAYA – Siapa nama – nama yang menjadi kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang masa jabatannya akan berakhir di penghujung tahun ini akhirnya terkuak. DPRD Jatim mengumumkan setidaknya ada tiga nama yang dicalonkan sebagai Pj Gubernur dalam rapat paripurna, Kamis (30/11/2023).

Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar yang memimpin rapat paripurna mengatakan total ada tiga nama calon Pj Gubernur yang diusulkan oleh DPRD Jatim ke Kemendagri. Diantara tiga nama itu ada Sekdaprov Jatim Adhy Karyono. Kemudian selain itu juga ada nama Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Adi Suryanto, dan yang ketiga adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Toms Tohir Balaw.

"Calon yang memenuhi syarat itu adalah Pejabat yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya," kata Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar saat memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Usul Penjabat Gubernur, Kamis (30/11/2023).

Rapat paripurna itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi beserta Wakil Ketua Anik Maslachah. Kemudian, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak.

Iskandar menjelaskan, sebelum



menghasilkan tiga nama calon Pj tersebut, pimpinan DPRD terlebih dahulu menjangkau usulan nama dari fraksi di dewan. Dari informasi yang berkembang sebelumnya, nama Adhy Karyono memang diusulkan oleh mayoritas fraksi. Hanya saja, Adhy tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Iskandar menjelaskan, sebelum diputuskan menjadi tiga nama, DPRD Jatim sudah melakukan klarifikasi terhadap nama kandidat. Tujuannya, memastikan persyaratan terpenuhi sebagaimana termuat dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dalam prosesnya, Iskandar berharap penunjukan Pj Gubernur Jatim nantinya oleh pemerintah pusat tetap memperhatikan netralitas.

"Kami berharap Pj Gubernur yang

nantinya ditunjuk merupakan figur yang netral yang dapat jalankan roda pemerintahan yang baik," ungkap politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi menjelaskan setelah rapat paripurna pihaknya akan segera memproses pengusulan nama calon Pj Gubernur itu kepada Kemendagri. Selanjutnya, usulan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Apalagi berdasarkan ketentuan, Menteri Dalam Negeri juga memiliki kewenangan untuk memunculkan calon. Nantinya, Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden. "Kita ini mengusulkan. Bisa jadi hasilnya tidak seperti yang kita usulkan," ungkap Kusnadi.

Sebelumnya, DPRD Jatim mengumumkan usulan pem-

berhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak sebagai Gubernur Jatim dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri. Pengumuman usulan itu disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD Jatim pada Senin (6/11/2023) lalu.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 2/P Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024, masa Jabatan Gubernur Khofifah-Wagub Emil Dardak akan berakhir pada 13 Februari 2024.

Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Mengacu peraturan tersebut, tugas dan wewenang Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan berakhir di tanggal 31 Desember 2023 mendatang. (lut/dya)

Perda Penanaman Modal Jaga Kestabilan dan Tingkatkan Iklim Investasi di Jatim

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal.

Persetujuan Raperda ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Gubernur Khofifah, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar di Gedung DPRD Jawa Timur pada Kamis (30/11/2023).

Dengan disetujuinya Raperda ini, Gubernur Khofifah optimis iklim investasi di Jawa Timur akan terus stabil dan semakin meningkat ke depannya. Raperda ini juga dapat mempertahankan tren positif investasi yang terus terjaga dan mengakselerasi penyelenggaraan penanaman modal melalui jaminan iklim investasi yang kondusif.

Hal ini sejalan dengan tujuan

penyusunan Raperda ini, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, Raperda ini juga bertujuan sebagai percepatan realisasi penanaman modal dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, dengan peningkatan kualitas dan pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan penanaman modal," kata Gubernur Khofifah.

Tujuan tersebut, juga sesuai dengan beberapa perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dimana mengubah 13 jenis UU termasuk di dalamnya perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Sebagai informasi, pembahasan Raperda Perubahan ini diawali pada saat penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Jatim dalam Rapat Paripurna pada 1 Agustus 2022 lalu. Pembahasannya melalui proses dua kali Propemperda, pada tahun 2022 dan 2023.

Gubernur Khofifah melanjutkan, urgensi Raperda Perubahan ini juga mengacu pada data dari Pokja 4 Kemenko Perekonomian RI, dimana faktor perizinan menjadi faktor utama yang menghambat penanam modal di Indonesia.

Tercatat, dari 190 masalah investasi yang ditangani, faktor terbesar adalah perizinan sebesar 32,6 persen. Yang kedua adalah pengadaan lahan sebesar 17,3 persen kemudian masalah regulasi

dan kebijakan sebesar 15,2 persen.

"Oleh sebab itu, simplifikasi regulasi di bidang penanaman modal, patut mendapatkan perhatian kita bersama," tegas Khofifah. (lut/dya)



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan Raperda Penanaman Modal bersama Pimpinan DPRD Jatim, Kamis (30/11/2023).

Aksi Buruh Diwarnai Kekerasan Terhadap Anggota Satpol PP

SURABAYA – Aksi demo ribuan buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 15 persen sempat diwarnai dugaan kekerasan yang dilakukan oknum buruh terhadap salah satu anggota Satpol PP yang sedang bertugas di Jalan Ahmad Yani, Kamis (30/11/2023).

Dugaan aksi kekerasan tersebut terekam dalam video yang tersebar di medsos. Dalam video, seperti yang diberitakan beritajatim.com, terlihat seorang anggota Satpol PP sempat ditendang dan dipukuli oleh oknum buruh. Tampak juga salah satu oknum buruh mengangkat water road barrier dan berniat memukulkan ke anggota Satpol PP yang sudah terjatuh. Aksi tersebut berhasil dicegah oleh buruh lainnya yang kemudian memisahkan mereka.

Kasatpol PP Kota Surabaya, M Fikser membenarkan bahwa ada anggotanya yang dianiaya saat bertugas di Jalan Ahmad Yani. Menurut Fikser, saat itu anggotanya hendak membukakan jalan bagi pengendara kota Surabaya yang hendak melintas. Saat ditegur, oknum buruh tidak terima dan melakukan penganiayaan.

“Memang ada dua anggota saya Jolodoro yang bertugas dan dianiaya. Posisi mereka ada di samping Bulog, posisi saat itu jalan macet kemudian ada warga yang minta tolong kepada mereka untuk memberikan jalan sedikit,” ujar Fikser saat dikonfirmasi awak media.

Berdasarkan keterangan yang didapat, dua anggota Satpol PP Surabaya yang dianiaya itu mendapatkan luka di sekujur tubuh. Ada anggota Satpol PP Kota Surabaya yang sudah jatuh dan diinjak-injak oleh oknum buruh. Atas peristiwa itu, Satpol PP Kota Surabaya akan membuat laporan ke Polrestabes Surabaya agar pelaku kekerasan segera ditangkap.

“Hari ini kami mau buat laporan kepolisian terkait dengan kekerasan yang dilakukan kepada anggota Satpol PP. Anggota saya bertugas membantu warga yang mau lewat tetapi tidak diberikan jalan malah dianiaya,”

imbuh Fikser.

Dua anggota Satpol PP Surabaya yang menjadi korban telah menjalani perawatan di RS Soewandi sekaligus visum untuk dijadikan bukti dalam pelaporan. Fikser pun menyesalkan adanya kekerasan yang terjadi kepada anggotanya. “Saat ini masih visum. Nanti kami berikan perkembangan terakhir bagaimana,” pungkas Fikser.

Diketahui, Ribuan Buruh Jatim demo menuntut kenaikan upah hingga 15% atau jika dinominalkan sebesar Rp 600 ribu. Massa aksi yang berasal dari seluruh Jawa Timur dan sempat berhenti di Jalan Basuki Rahmat untuk berorasi hingga lebih dari 40 menit. Setelah selesai, buruh kembali melanjutkan aksinya di kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan.

Sebelumnya, massa aksi juga sempat melakukan sweeping buruh di pabrik-pabrik di Rungkut Industri, Surabaya. Sweeping di Rungkut Industri berlangsung sekira pukul 10.00 WIB. Pabrik-pabrik yang menjadi sasaran sweeping kemudian mengirimkan perwakilan untuk ikut aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur.

Para pekerja itu ingin mendesak agar Khofifah Indar Parawansa menaikkan UMK Jawa Timur sebesar 15 persen. Lalu meminta pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 2023 sebagai dasar hukum penentuan UMK. Pasalnya dasar itu menyebabkan berada di bawah ekspektasi.

“Ayo demo-demo jangan pasrah aja. Jangan hanya meniti nasib aja, ayo demo,” ucap salah seorang buruh saat sweeping pabrik di Rungkut Industri.

Tarno, seorang dari mereka mengatakan, kenaikan upah merupakan hak setiap buruh setiap tahun. Untuk menciptakan nominal yang sesuai harapan memang butuh perjuangan, salah satunya dengan turun ke jalan. Dia berharap pemerintah dan perusahaan dapat merespons positif tuntutan-tuntutan para buruh.

Sementara itu, sejumlah buruh sudah tiba di lokasi, mereka ada yang mulai melaksanakan orasi. Sedangkan petugas kepolisian melakukan



Petugas kepolisian melakukan penjagaan ketat di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur pada pelaksanaan demo buruh, Kamis (30/11/2023) -Ant

penjagaan di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Surabaya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Jazuli menyatakan aksi hari ini dilaksanakan untuk meminta adanya kenaikan UMK sebesar 15 persen.

“Angka 15 persen ini didapat dari nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun berjalan serta prediksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun depan,” ujarnya melalui keterangan resmi.

Berdasarkan keterangan tersebut, aksi demo ini diikuti sekitar 20 ribu massa aksi yang datang dari belasan serikat pekerja.

“Puluhan ribu massa buruh tersebut juga berasal dari daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Jombang, dan Nganjuk,” ujarnya

Pantauan di Kantor Gubernur Jawa Timur, massa berdatangan sejak pukul 13.00. Namun saat itu jumlah massa tidak terlalu banyak. Paling-paling 500 orang. Dua jam kemudian massa yang datang semakin banyak. Sampai-sampai arus lalu lintas di Jalan Pahlawan macet.

Aksi selesai pada pukul 18.41 setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berkomitmen memenuhi tuntutan buruh dengan tidak menggunakan PP Nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sebagai acuan utama untuk menentukan kenaikan UMK.

Sementara itu, Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya aksi demo buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMKM)

sebesar 15 persen.

“Estimasi 2.500-3.000 personel kami turunkan,” kata Kepala Seksi Humas Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Polisi (AKP) Haryoko Widhi di Surabaya, Kamis (30/11/2023).

Haryoko menjelaskan teknis pengamanan tak berbeda dari demo sebelumnya dengan menempatkan petugas mulai titik kumpul, sejumlah ruas jalan dilalui hingga lokasi utama pelaksanaan demo.

“Titik kumpul mulai dari CITO, jadi kami tempatkan petugas di beberapa titik jalur sampai Grahadi, Kebun Binatang Surabaya, ada juga kantor pemerintahan di Tugu Pahlawan,” ujarnya.

Karenanya, dia meminta para pengendara kendaraan bermotor agar memilih jalur alternatif ketika hendak melintasi rute-rute yang dilalui pendemo.

Di sisi lain, Haryoko juga mengimbau para buruh agar melaksanakan aksi demo terkait UMK dengan menjaga kondusivitas.

“Imbauannya untuk teman-teman yang demo silakan memberikan aspirasi, tapi patuhi himbauan petugas di lapangan dan saling menghargai dengan pengguna jalan lain,” ujar dia.

Pantauan di lapangan, petugas kepolisian berjaga di sejumlah ruas jalan yang nantinya bakal dilalui iring-iringan massa aksi demo buruh jelang penetapan besar UMK untuk tahun 2024.

Beberapa ruas jalan itu, mulai Jalan Frontage Ahmad Yani, Jalan Rata Wonokromo, Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, Jalan Bubutan, hingga Jalan Pahlawan tempat lokasi aksi dilaksanakan. (Jan/lut)

Belum Kantongi AMDAL, DPRD Kota Malang Soroti Proyek WTP Sungai Bango



Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Kamis (30/11/2023). (Dok. Istimewa)

MALANG - Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyoroti terkait kurangnya keterlibatan dewan terkait proyek pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di Sungai Bango, Kecamatan Blimbing. Apalagi hingga saat ini, proyek tersebut belum

memperoleh izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang seharusnya menjadi syarat pengerjaan awal pembangunan.

"Kita minta pada Pak Pj Wali Kota, untuk segera mendalami. Karena terkait proyek WTP itu, sampai saat ini

saya selaku Ketua DPRD Kota Malang, belum menerima dokumen selebar pun terkait WTP. Sehingga kami merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam perjanjian kerjasama antara Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta ini," ujar Made, ditemui usai memimpin rapat paripurna Kamis (30/11/2023).

Made juga berharap, agar dalam pelaksanaan penyelesaian perizinan AMDAL proyek WTP tersebut nantinya dapat berjalan baik dan benar. Sehingga sambungnya, tidak hanya secara teknis saja, namun sesuai dengan aturan-aturan

yang ada.

"Kita tidak ingin penyelesaian harus baik dan benar secara teknis saja, kemudian secara aturan itu akan bermasalah dikemudian hari. Sehingga kita harapkan pelaksanaan-

nya itu baik dan benar," tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan penjelasan terkait status kelanjutan proyek WTP. Menurutnya, sampai saat ini perizinan masih berproses dan akan dilengkapi. Pihaknya juga menegaskan, telah bersepakat dengan Perumda Tugu Tirta dan Perum Jasa Tirta (PJT) I, untuk tidak melanjutkan proyek sebelum melengkapi perizinan.

"Kita lihat sampai perizinan sudah lengkap, kemudian apabila sudah memenuhi semua kita akan teruskan. Karena terkait dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ini kan penting dan memang harus kita penuhi," kata Wahyu.

Senada dengan harapan Made. Wahyu juga menekankan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan proyek tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan sekitar.

"Kita lihat sampai perizinan sudah lengkap kemudian apabila sudah memenuhi semua kita akan diteruskan. Karena Terkait dengan AMDAL ini kan memang ada hal yang harus kita penuhi," pungkasnya. (Santi/dya)

Gelar Pameran Anggrek di Desember, Pemkot Batu Targetkan Perputaran Uang Miliaran Rupiah

BATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan menggelar Batu Shining Orchid Weeks 2023 pada 1-9 Desember mendatang. Dalam kegiatan yang bekerjasama dengan Persatuan Anggrek Indonesia (PAI) Jawa Timur ini, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, memproyeksikan uang belasan miliar rupiah akan berputar.

Aries optimistis bisa mencapai target ini. Sebab di Batu Shining Orchid Weeks 2022, pameran mampu membukukan perputaran ekonomi sebesar Rp 16 miliar. Target yang lebih tinggi ditetapkan untuk tahun ini, menandakan keyakinannya akan keberhasilan gelaran ini dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pastinya, kita terus mematangkan rencana kegiatan Batu Shining Orchid Weeks 2023 yang sudah dinantikan kehadirannya. Sangat rugi



Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai. (Dok. Prokopim Kota Batu)

nanti kalau tidak hadir menyaksikan berbagai koleksi langka anggrek dari berbagai daerah di seluruh Indonesia," ujar Aries, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (30/11/2023).

Aries menambahkan bahwa

gearan ini akan diisi oleh 74 stan pameran, yang tidak hanya melibatkan peserta dari Jawa Timur, tetapi juga dari berbagai provinsi di Indonesia. Tidak hanya itu, keikutsertaan peserta dari negara tetangga, seperti

Singapura, juga akan menjadi salah satu daya tarik utama dalam gelaran ini.

"Dalam landscape kompetisi, panitia sudah mengundang 6 wilayah. Mulai dari Bali, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan Selatan, termasuk Jawa Timur. Bahkan dari negara tetangga Singapura juga sudah kita undang," terangnya.

Untuk memastikan kesuksesan acara ini, Aries berharap agar promosi yang masif dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk OPD Kota Batu. Tujuannya yakni agar informasi seputar Batu Shining Orchid Weeks 2023 dapat tersebar luas di masyarakat.

"Batu Shining Orchid Weeks 2023 ini kita siapkan 74 stan pameran. Kita juga menyiapkan dengan baik pembukaan kegiatan ini serta melibatkan seluruh UMKM yang ada di Kota Batu," pungkasnya. (Santi/dya)

Rahasia Kulit Glowing

ARIANA GRANDE

SIAPA tak kenal penyanyi peraih Grammy, Ariana Grande. Sebagai publik figur pastinya tak boleh melewatkan perawatan kulit.

Namun, ternyata rahasianya hanya cukup 3 langkah. Melansir Truly Beauty, Ariana Grande menyadari pentingnya perawatan kulit, terutama di lingkungan tempat dia bekerja, di mana penggunaan riasan adalah rutinitas sehari-hari.

Pelantun "Thank U, Next" ini berbagi tips agar kulitnya tetap glowing atau bercahaya di tengah kesibukannya di industri hiburan.

Hal paling penting yang dia pelajari dari tur dan berada di lokasi syuting selama bertahun-tahun berturut-turut adalah untuk memastikan kulit terlindungi.

Ketika memakai riasan dalam jangka waktu lama, jika tidak menggunakan produk yang tepat untuk kulit Anda, maka hal itu bisa memberikan dampak buruk.

Pemenang Grammy ini mengatakan bahwa dia sering mengalami jerawat ketika masih di awal berkarier di dunia hiburan, karena bekerja setiap hari di lokasi syuting dan menggunakan produk yang salah.

Ariana berkata, untuk menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya, pastikan untuk memilih bahan perawatan kulit yang efektif dalam rutinitas perawatan kulit dan riasan.

Di samping memilih produk yang cocok, Ariana memiliki rutinitas yang tak rumit terkait dengan penggunaan produk perawatan kulit. Dia memiliki rutinitas yang cukup sederhana hanya dengan 3 langkah.

Langkah 1: Cuci dan Scrub

Membersihkan kulit adalah langkah penting yang pertama dilakukan dalam rutinitas Ariana. Langkah ini adalah kunci untuk menjaga kulit tetap segar dan bebas noda. Yang dimaksud dengan "scrub" adalah pengelupasan atau eksfoliasi kulit. Baik dengan scrub wajah, exfoliant kimia, atau handuk wajah.

Eksfoliasi adalah cara efektif untuk menjaga kulit tetap halus dan bersih.

Cara ini bisa menghilangkan penumpukan sel kulit mati dan kotoran untuk membuka pori-pori yang tersumbat, memungkinkan sel-sel baru muncul ke permukaan, dan membuat kulit lembut dan bercahaya.

Langkah 2: Campurkan Pelembab dengan Tabir Surya/SPF

Langkah selanjutnya dalam rutinitas perawatan kulit Ariana Grande adalah melembabkan kulit. Hidrasi sangat penting setelah kulit dibersihkan karena dapat menghilangkan minyak alami kulit, sehingga membuat kulit kering.

Dia juga sering mencampurkan pelembab dengan SPF untuk memastikan kulitnya mendapat perlindungan optimal terhadap sinar UV yang berkontribusi terhadap tanda-tanda penuaan dini.

Adapun, yang dilakukan Ariana Grande saat sedang breakout atau berjerawat adalah dengan menggunakan pelembab lotion. Alih-alih mengoleskan larutan pengering pada jerawat, menurutnya hal terbaik yang bisa dilakukan untuk kulit berjerawat adalah melembabkannya karena "minyak memecah minyak."

Langkah 3: Oleskan Minyak Kelapa

Alih-alih beralih ke krim dan losion mewah saat kulitnya kering, Ariana memilih mengoleskan minyak kelapa.

Banyak orang yang mengira minyak kelapa akan membuat Anda berjerawat. Namun, ternyata tidak. Ariana menggunakan minyak kelapa di mana-mana, dari ujung rambut hingga ujung kaki.

Meskipun dokter kulit tidak merekomendasikannya jika Anda memiliki kulit berminyak, tapi ini bisa menjadi pilihan bagus untuk orang dengan kulit kering. (Bisnis)





PENYEBAB USUS BUNTU YANG HARUS DIWASPADAI

USUS buntu yang meradang bisa pecah dan berbahaya bagi kesehatan tubuh seseorang.

Penting diingat, menjaga usus yang melekat pada usus besar ini sangat penting. Pasalnya ketika usus buntu mengalami apendisitis, usus buntu bisa saja pecah.

Apendisitis adalah peradangan pada usus buntu, sebuah kantong kecil yang menempel pada usus besar di perut kanan bawah.

Apendisitis dianggap sebagai keadaan darurat medis yang memerlukan perhatian segera karena usus buntu yang meradang dapat pecah dalam 36 jam pertama setelah gejala muncul, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of American College of Surgeons*.

Pecahnya usus buntu dapat menyebabkan komplikasi seperti peritonitis, yaitu infeksi serius yang dapat menyebar ke perut atau abses, yaitu kumpulan nanah.

PENYEBAB RADANG USUS BUNTU

Apendisitis dapat disebabkan oleh lebih dari satu faktor kemungkinan. Kemungkinan penyebabnya termasuk tinja yang mengeras yang dapat menghalangi pembukaan usus buntu, pembesaran jaringan di dinding usus buntu atau penyakit radang usus.

Ukuran dan lokasi usus buntu membuatnya mudah tersumbat dan terinfeksi. Terkadang, radang usus

buntu dimulai dengan infeksi dan terkadang, infeksi bersifat sekunder.

Faktor lain yang dapat menghalangi pembukaan usus buntu adalah tumor, parasit dan Fibrosis kistik.

GEJALA RADANG USUS BUNTU

Gejala radang usus buntu dapat berupa demam, sakit perut, kurang nafsu makan, muntah, sembelit dan diare. Ada ciri khas gejala-gejala yang dapat mempermudah mengenali radang usus buntu.

Namun sayangnya, hanya sekitar separuh penderita radang usus buntu yang memiliki gejala klasik. Anak-anak, orang lanjut usia dan orang hamil cenderung tidak mengalami gejala yang khas.

Pada gambaran awal radang usus buntu, nyeri perut dimulai di bagian tengah perut, di sekitar pusar. Hal ini mungkin melayang atau datang dan pergi selama beberapa jam.

Akhirnya, rasa sakitnya semakin parah dan timbul mual serta muntah. Beberapa jam kemudian, rasa mualnya hilang dan rasa sakitnya berpindah ke perut kanan bawah, tempat usus buntu berada. Rasa sakitnya akan menjadi lebih terfokus dan terus memburuk.

BERBAHAYA

Usus buntu Anda adalah organ kecil berbentuk tabung yang melekat

pada usus besar. Peradangan di organ ini adalah kondisi medis yang memerlukan perhatian medis segera.

Dilansir dari Mayo Clinic, radang usus buntu menyebabkan nyeri pada perut kanan bawah. Namun, pada kebanyakan orang, nyeri dimulai di sekitar pusar dan kemudian berpindah-pindah.

Ketika peradangan memburuk, nyeri usus buntu biasanya meningkat dan akhirnya menjadi serius. Siapa pun dapat terkena radang usus buntu, tetapi paling sering penyakit ini terjadi pada orang berusia antara 10 dan 30 tahun.

Pengobatan radang usus buntu biasanya berupa antibiotik dan pembedahan untuk mengangkat usus buntu. Dilansir dari Cleveland Clinic, radang usus buntu hampir selalu merupakan kondisi akut yang artinya penyakit ini muncul secara tiba-tiba dan memburuk dengan cepat.

Tanda-tanda awal radang usus buntu dan tanda bahayanya adalah nyeri perut dimulai di bagian tengah perut, tepatnya di sekitar pusar. Ini mungkin datang dan pergi selama beberapa jam.

Akhirnya, rasa sakitnya semakin parah, dan timbul mual serta muntah. Beberapa jam kemudian, rasa mualnya hilang dan rasa sakitnya berpindah ke perut kanan bawah, tempat usus buntu berada. Rasa sakitnya menjadi lebih terfokus dan terus memburuk. Indikasikan adanya usus buntu dan bisa dianggap berbahaya:

1. Demam

Sebanyak 40 persen orang dengan usus buntu mengalami demam. Ini mungkin juga berarti peradangan meningkat atau infeksi menyebar.

2. Rasa tidak enak badan

Anda mungkin menyadari bahwa Anda merasa tidak enak badan secara umum. Anda mungkin kekurangan energi atau motivasi dan merasa ingin tetap di tempat tidur, seperti yang Anda lakukan saat sakit.

3. Perut bengkak

Perut mungkin terlihat buncit atau terasa kembung. Ini biasanya merupakan gejala lanjutan dan mungkin mengindikasikan usus buntu Anda telah pecah.

4. Gejala saluran kemih

Anda mungkin merasa harus buang air kecil lebih sering atau lebih mendesak. Hal ini bisa terjadi jika radang usus buntu mengiritasi saraf yang terhubung ke kandung kemih Anda.

5. Kelumpuhan usus

Saat tubuh mengalihkan aliran darah dari usus ke usus buntu, usus Anda bisa berhenti bergerak untuk sementara. Beberapa orang mengalami sembelit dan merasa tidak bisa buang angin (Bisnis)

WULING BINGUO EV PALING DIBURU

WULING Motors (Wuling) setelah resmi memperkenalkan Wuling BinguoEV yang mendapatkan respon cukup positif dengan mencatat 1.000 SPK dan BinguoEV varian 410 km menjadi yang paling diminati.

Menurut Brand & Marketing Director Wuling Motors, Dian Asmahani pihaknya sangat mengapresiasi sambutan hangat dari konsumen elektrik di Indonesia.

Hadirnya Wuling Binguo EV menjadi suksesor Wuling Air EV yang terjual lebih dari 12 ribu unit di Indonesia.

Antusiasme yang tinggi dari konsumen menunjukkan respon positif terhadap kendaraan ramah lingkungan ini dan bukti nyata dari pasar mobil listrik di Tanah Air yang semakin berkembang.

"Pencapaian angka pemesanan ini tidak hanya mencerminkan daya tarik dari BinguoEV yang ikonik, tetapi juga penanda bila kini konsumen semakin menyadari pentingnya solusi

mobilitas berkelanjutan," kata Dian Asmahani dalam keterangan resminya.

Sambutan yang cukup positif ini tidak lepas dari banyaknya manfaat yang diberikan oleh pabriknya kepada para calon pemilik Wuling BinguoEV, seperti Lifetime Core EV Component Warranty yang meliputi power battery, drive motor, dan motor control unit untuk varian tertinggi.

Dia juga menjelaskan bahwa garansi tersebut mencakup komponen-komponen inti kendaraan listrik, salah satunya power battery yang merupakan salah satu bagian paling penting dalam kendaraan listrik.

Selain itu, komponen penting lainnya yang termasuk dalam program lifetime warranty ini adalah drive motor dan motor control unit.

Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dalam menghasilkan tenaga dan menggerakkan roda kendaraan listrik.

Tidak hanya sampai di situ, Wuling

juga memberikan manfaat lain kepada calon pelanggan BinguoEV pada masa pre-book seperti Electric Icon Priority Pack untuk BinguoEV varian 410 km.

Keuntungan tersebut terdiri dari gratis AC Charging Device berdaya 7,7 kW, gratis biaya perawatan berkala hingga 5 tahun atau 50.000 kilometer (yang mana tercapai dahulu), voucher listrik periode dua tahun dengan nilai Rp4 juta, hingga aksesoris berupa storage box, kaca film, dan karpet untuk konsumen yang melakukan pemesanan.

Dalam hal ini, total manfaat yang bisa diterima oleh para pemiliknya nanti mencapai Rp47 juta. Konsumen yang melakukan pemesanan BinguoEV varian 333 km juga berkesempatan mendapatkan beberapa keuntungan yang terdiri dari AC Charging Device dan aksesoris (storage box, kaca film, dan karpet)

Wuling menghadirkan BinguoEV ini dengan menanamkan berbagai desain an juga teknologi terkini. Dari sisi dalam, mobil listrik kompak ini memiliki kabin yang luas dengan jok berbahan semi leather yang menyajikan kenyamanan ekstra bagi penumpang dan pengemudi.

Seperti pada mobil Wuling yang lainnya, BinguoEV juga sudah disediakan fitur Electric Seat Adjustment.

Pada bagian dashboard, terdapat Multifunction Steering Wheel yang dilengkapi tombol peng-operasian audio dan pengaturan menu.

Rotary Gear Selector juga kembali dihadirkan di BinguoEV sebagai pengoperasi transmisi dengan knop putar futuristik.

Selain itu, konsol tengah kendaraan ini juga turut dilengkapi dengan tombol Electric Parking Brake dan Auto-Vehicle Holding. Perjalanan pun semakin menyenangkan berkat sistem hiburan yang terintegrasi di 10.25" head unit.

Mobil berjenis hatchback lima pintu ini menggunakan pelek berdesain percikan air (water splash) berukuran 185/60 ring 15 serta telah dilengkapi rem cakram di bagian depan dan belakang.

Pada bagian interior, Binguo EV menawarkan ruang kabin yang cukup lapang dengan konfigurasi kursi 50:50 di baris kedua serta memiliki 15 ruang kompartemen. Kursinya menggunakan material kulit sintetis perforasi.

Kendaraan listrik kedua Wuling ini juga dilengkapi layar ganda berukuran 10.25 inci TFT Dual Screen yang terintegrasi. Layar tersebut disematkan di atas Floating Island Center Console yang menciptakan tampilan futuristik.

Wuling Binguo EV hadir dalam dua pilihan jarak tempuh yaitu 333 km dan 410 km. Untuk jarak tempuh 333 km menggunakan baterai berkapasitas 31,9 kWh, drive motor 50 kW, torsi 150 Nm dan kecepatan tertinggi 120 km/jam.

Sedangkan untuk jarak tempuh 410 km menggunakan baterai berkapasitas 37,9 kWh, drive motor 5p kW, torsi 125 Nm dan kecepatan tertinggi 130 km/jam. (Ant)



HARIAN
LETERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LETERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARKO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



TIPS LIBURAN

UNTUK AKHIR TAHUN

LIBURAN merupakan hal yang sangat disukai dalam kehidupan modern, dalam dunia yang sibuk ini setiap orang pasti suka melakukannya, sob. Salah satunya dengan mengunjungi destinasi wisata.

Terlebih saat akhir tahun. Liburan seakan jadi momen berharga untuk menjaga keseimbangan hidup setelah penat bekerja.

Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan, seperti mengurangi stress hingga memberi jeda, untuk diri sendiri agar tetap "waras".

Meski begitu, ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan untuk membuat liburan yang berkesan. Simak tips liburan.

Pastikan Tujuan Liburan

Menentukan tujuan liburan akan sangat untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan saat liburan. Jika berencana liburan atau bersantai di pantai, pasti kebutuhannya akan berbeda jika sobat liburan ke area pegunungan.

Menentukan Durasi Liburan

Dengan menentukan durasi liburan, Anda dapat mengatur aktivitas apa saja yang akan dilakukan saat liburan. Sehingga bisa membuat perencanaan anggaran yang dibutuhkan secara matang dan akurat.

Pilih Waktu Ideal

Saat merencanakan liburan, jangan lupa untuk mengecek perkiraan cuaca pada waktu liburan yang direncanakan. Sebaiknya melakukan perjalanan liburan saat musim hujan. Terutama untuk liburan bertema outdoor.

Siapkan Penginapan

Kalau rencana liburan membutuhkan waktu hingga berhari-hari, jangan lupa siapkan penginapan yang nyaman, sob. Jangan pesan terlalu mepet, agar bisa melakukan perbandingan. Baik soal harga, fasilitas, hingga jarak ke destinasi wisata.

Siapkan Transportasi

Selain menyiapkan penginapan, penggunaan transportasi juga perlu dipertimbangkan, sob. Jika harus menggunakan pesawat, pastikan memesannya sejak jauh hari agar mendapatkan harga terbaik.

Begitupun kalau sobat akan menggunakan transportasi darat seperti mobil. Siapkan mobil terbaik yang akan digunakan. Jangan khawatir kalau nggak punya mobil pribadi.

Charger dan Adaptor Listrik

Kehabisan daya pada perangkat elektronik saat bepergian bisa menjadi masalah. Jadi pastikan bawa

charger dan adaptor listrik yang sesuai dengan negara tujuan. Ini akan memudahkan kamu untuk mengisi daya ponsel, kamera, atau perangkat elektronik lainnya.

Uang Tunai dan Kartu Kredit

Pastikan membawa cukup uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya membawa makanan, transportasi, dan kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, pastikan juga membawa kartu kredit atau kartu debit sebagai cadangan.

Paspor dan Dokumen Penting

Saat bepergian ke luar negeri, pastikan membawa paspor dan dokumen penting lain. Jangan lupa untuk membuat salinan cadangan dari semua dokumen tersebut, seperti tiket pesawat, reservasi hotel, dan asuransi perjalanan. Simpan salinan tersebut di tempat yang terpisah dari dokumen asli (berbagai sumber)



Ambyar! Utang RI ... (dari Hal 1)

POSISI utang pemerintah per 31 Oktober 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau lebih besar daripada posisi utang per September 2023 yang sebesar Rp 7.891,61 triliun. Dilansir dari buku APBN Kita Edisi November 2023, posisi utang sebesar Rp 7.950 triliun ini setara dengan 37,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun begitu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rasio utang menurun dibandingkan akhir 2022 yang sebesar 39,70 persen dari PDB.

"(Utang pemerintah) masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu, dikutip dari buku APBN Kita Edisi November 2023.

Sementara itu, komposisi utang pemerintah tersebut didominasi oleh utang domestik sebesar 71,78 persen. Berdasarkan instrumen, komposisi utang mayoritas berupa penerbitan SBN yang mencapai 88,86 persen atau Rp 7.048,90 triliun.

Secara rinci, utang dalam bentuk SBN di domestik atau denominasi rupiah adalah Rp 5.677,55 triliun. Sedangkan dalam bentuk denominasi valuta asing sebesar Rp 1.371,35 triliun.

"Kepemilikan investor individu di SBN domestik terus meningkat mulai 2019 yang hanya mencapai 2,95 persen menjadi 7,46 persen pada periode ini," tulis Kemenkeu.

Sedangkan perbankan menjadi pemilik SBN domestik terbesar, yaitu mencapai 29,18 persen per akhir Oktober 2023. Ini kemudian diikuti oleh perusahaan asuransi dan dana pensiun yang memegang SBN sekitar 18,49 persen.

Selain itu, Bank Indonesia juga memegang SBN sebesar 17,20 persen untuk instrumen pengelolaan moneter. Sedangkan investor asing memiliki SBN domestik sekitar 14,65 persen, termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sementara itu, sisa kepemilikan SBN dipegang oleh institusi domestik lainnya.

Selain berupa penerbitan SBN, utang pemerintah juga didapatkan dari pinjaman sebesar Rp 901,62 triliun. Rinciannya berasal dari dalam negeri sebesar Rp 29,52 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp 872,09

"Nilai rasio utang tersebut lebih rendah dibandingkan akhir tahun lalu dan masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," jelasnya. Selain itu, rasio utang ini juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan pada kisaran 40 persen dalam Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026.

"Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal," ujarnya.

Lebih lanjut, utang pemerintah secara mayoritas berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,78 persen.

Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan mengelola portofolio utang secara aktif. Di sisi lain, per periode ini profil jatuh tempo utang Pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.

Terpisah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menanggapi soal posisi utang pemerintah yang mencapai Rp 7.950,52 triliun per Oktober 2023.

Bhima menuturkan, banyak studi mengatakan korelasi negatif antara semakin banyak utang dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kata Bhima, utang itu bagi pemerintah tidak selalu sebagai leverage atau pinjaman modal.

"Tapi sebagai beban atau beban bagi pertumbuhan ekonomi, karena utang tadi mengambil uang dari masyarakat atau meng-cancel out investasi yang harusnya masuk ke sektor riil tapi masuk ke SBN (surat berharga negara)," kata Bhima.

Dia menjelaskan, ini karena SBN dinilai memiliki risiko yang rendah tapi memberikan yield atau imbal hasil yang menarik. Bahkan, imbal hasil SBN Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

"Nah kalau terus dilanjutkan, uang buat sektor riil tersedot ke pemerintah atau bahasa kerennya crowding out effect, maka ini akan bisa menjadi fenomena debt overhang atau overhang utang," papar Bhima.

Jadi, menurut dia, utang pemerintah pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa utang meningkat tapi pertumbuhan stagnan di 5 persen.

Mulai 'Kekeringan' Uang

Pengusaha di dalam negeri buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023, di Grha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu malam (29/11/2023). Dalam pidatonya, Jokowi menyoroti kabar soal peredaran uang yang semakin mengering yang dikeluhkan pengusaha. Kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi sektor riil. Yang dibenarkan oleh pengusaha, di mana dikhawatirkan akan memicu efek domino hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Komisaris Apac Investama Tbk Benny Soetrisno mengatakan, saat ini pertumbuhan kredit perbankan memang masih belum sampai 2 digit. Karena sumber dari dana pihak ketiga (DPK) yang juga melambat.

"Likuiditas di perbankan mengering tentu akan memberikan efek ke sektor dalam hal ekspansi kredit investasi akan berkurang bahkan bisa berhenti. Pengusaha akan mencari jalan keluar dengan mencari pendanaan dari luar negeri atau meningkatkan modal sendiri

(cached equity) untuk melakukan ekspansi produksi maupun ekspansi perdagangannya," katanya, Kamis (30/11/2023).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia itu memberikan arahan terkait perekonomian Indonesia. Dan membeberkan sederet isu terkait kondisi perekonomian global.

Jokowi pun menyoroti keluhan pelaku usaha terkait minimnya peredaran uang imbas dari pembelian instrumen keuangan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. "Tadi saya sampaikan ke Pak Gub, 'Pak Gub saya mendengar dari banyak pelaku usaha ini kelihatannya kok peredaran uangnya makin kering di pelaku-pelaku. Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN atau terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SRBI atau SVBI. sehingga masuk ke sektor riil menjadi berkurang,'" kata Jokowi.

"Dan juga dari fiskalnya juga sama kita cek realisasi belanja pemerintah daerah, realisasi belanja Pemda padahal tinggal 3 minggu, itu masih di angka 64%. Pemerintah pusat juga masih di angka 76%," lanjutnya.

"Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan saya telepon pak Gubernur, eh tapi nggak telpon Pak Gub nanti intervensi. Menkeu pasti saya telepon ini kondisinya seperti apa sebetulnya," sebut Jokowi.

Dia pun mengingatkan meski harus hati-hati tapi tetap harus siap dengan skenario cepat merespons perubahan ke depan. "Kita harus optimis tapi harus tetap waspada tetap harus hati-hati waspada pada perubahan super cepat perubahan disrupti teknologi yang juga super cepat, memang kita harus prudent dalam melangkah tapi juga jangan terlalu hati-hati, kredit terlalu hati-hati semua terlalu hati-hati akibatnya kering perputaran (uang) di sektor riil," tegas Jokowi.

Kenaikan Signifikan untuk Kemenhan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hasil penting dari pertemuan antara dirinya, Presiden Jokowi, dan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Selasa (28/11/2023). Sri Mulyani mengungkapkan pertemuan tersebut membahas tentang alokasi anggaran pertahanan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas detail mengenai belanja alutsista, yang sebagian besar bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2023).

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan, yang dicatat dalam DIPA, sejalan dengan kementerian lain. Namun, untuk Kementerian Pertahanan, ada alokasi signifikan dari pinjaman luar negeri, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Sri Mulyani membeberkan bahwa

pada awalnya, alokasi anggaran untuk periode 2020-2024 ditetapkan sebesar 20,75 miliar USD. "Waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 20,75 miliar USD untuk periode 2020-2024," tambahna.

Namun, karena adanya perubahan kebijakan, anggaran untuk tahun 2024 dinaikkan menjadi 25 miliar USD, menandai kenaikan yang signifikan. "Jadi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD. Itu yang kemarin di-sepakati," ungkap Srimulyani. (wid,ktn,rls,ist/dya)



PEMBIAYAAN UTANG INDONESIA

Per 31 Oktober 2023

Realiasi Pembayaran Utang

RP 203.62

Surat Berharga Negara (Neto)

RP 185.42

Pinjaman (Neto)

RP 18.20

● Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

RP 7.92

■ Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)

RP 10.11

■ Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri

RP (2.19)

● Pinjaman Luar Negeri (Neto)

RP 10.28

■ Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

RP 78.33

■ Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri

RP (68.05)

(Dalam Triliun Rupiah)



DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA, TERNYATA FIRLI MASIH DIGAJI

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Firli Bahuri. (dok.ist)



JAKARTA-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Firli Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (1/12/2023). Meski diduga terlibat korupsi namun ternyata dia diketahui tetap menerima gaji sebesar 75 persen atau sekitar Rp 61.940.000 tunai.

"Karena sudah jadi tersangka, maka Firli penghasilannya dipotong 25 persen. Artinya, dia tetap menerima 75 persen walau nonaktif," kata eks penyidik KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11/2023).

Secara terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan hal itu. Dia menyebut, Firli masih menerima haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2006. "Jadi PP tahun 2006 itu memang mengatakan demikian, ketika diberhentikan sementara itu berhak menerima penghasilan 75 persen dan itu tetap berlaku PP, maka tidak boleh kita simpangi tentunya, nanti akan ada peraturan yang kita langgar," kata Ali kepada wartawan.

Adapun aturan yang dimaksud, yakni PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Pimpinan, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Dalam Pasal 7 aturan itu disebutkan, 75 persen penghasilan yang diterima Firli berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan.

Besaran gaji yang diterima Firli saat menjabat sebagai Ketua KPK diatur dalam PP Nomor 82 Nomor 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP 29 Tahun 2006. Pada kondisi normal atau tidak menjadi tersangka, total gaji dan tunjangan yang ia peroleh mencapai Rp 123.938.500.

Rinciannya, gaji pokok Rp 5.040.000, tunjangan jabatan Rp 24.818.000, dan tunjangan kehormatan Rp 2.396.000. Sehingga total penghasilan Firli sebagai Ketua KPK aktif yang diterima dalam sebulan dengan bentuk tunai sebesar Rp

32.254.000.

Kemudian, dia juga berhak mendapatkan tunjangan fasilitas berupa tunjangan kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, dan tunjangan hari tua Rp 8.063.500. Total tunjangan fasilitas itu dalam satu bulan mencapai Rp 99.550.000. Namun, tunjangan kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua diberikan kepada lembaga asuransi, tidak diterima secara tunai.

Namun, setelah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK, Firli tidak menerima gaji secara utuh. Pasal 7 Ayat (3) PP Nomor 29 Tahun 2006 menyatakan, pimpinan KPK yang menjadi tersangka mendapat penghasilan 75 persen dari penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan. Sementara itu, Ayat (4) Pasal tersebut menyatakan, Firli tetap berhak mendapatkan tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan dan jiwa, serta tunjangan hari tua.

Merujuk aturan itu, Firli masih menerima gaji, tunjangan jabatan, dan kehormatan sebesar Rp 24.190.500 dari nilai seharusnya Rp 32.254.000. Lalu, dia juga tetap mendapatkan tunjangan fasilitas berupa tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, serta tunjangan kesehatan dan jiwa senilai Rp 62.138.500.

Dengan demikian, meski sudah berstatus tersangka kasus korupsi dan diberikan sementara dari jabatannya, Firli masih menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas total senilai Rp 86.329.000. Sebanyak Rp 61.940.000 diberikan kepada Firli dalam bentuk tunai setiap bulannya. Sedangkan Rp 24.388.500 yang terdiri dari tunjangan kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua diberikan langsung kepada lembaga asuransi.

Dewas Disebut Tak Mengawasi

Sementara itu, Pimpinan KPK periode 2015-2019 Saut Situmorang telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firli

Bahuri kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Saut berperan sebagai saksi ahli yang menjelaskan nilai-nilai KPK dalam kasus tersebut.

"Hari ini ada beberapa poin lah, hampir 5. Di antaranya yang terkait langsung dengan prinsip-prinsip KPK, dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan," ucap Saut Situmorang di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Saut menjelaskan pelanggaran yang terjadi nantinya akan disesuaikan dengan nilai yang ada di KPK. Dia lalu menyinggung Dewas KPK juga tak mengawasi terimplementasinya nilai-nilai itu. "Tadi kita fokus terhadap nilai-nilai yang dilanggar di KPK itu sendiri, begitupun dengan Dewas yang tidak mengawasi nilai-nilai itu," ucap Saut.

Saut menyebut pelanggaran tersebut akan dikenakan sejumlah pasal. Diantaranya Pasal 12e dan Pasal 12B. "Kalau pasalnya kan nanti kaitannya dengan tentunya 12 e itu dengan 12 B tetap mungkin menarik untuk dilihat. Kalau 12 e itu kan harus ada kata memaksa untuk kemudian baru kena seumur hidup, nanti kita lihat seperti apa hasil penyidik," jelasnya.

Saut diperiksa selama dua jam, di mana ia mulai diperiksa sekitar pukul 13.37 WIB dan selesai pukul 15.21 WIB. Ia menyebut pertanyaan yang diajukan penyidik tidak lebih dari 5 pertanyaan. "Kurang dari 5 (pertanyaan)," aku Saut.

Lebih lanjut, Saut turut menilai foto Firli dan SYL yang beredar di media sudah bisa terbilang melanggar hukum. Namun, ia mengaku penilaian tersebut akan dikembalikan kepada penyidik. "Ketika foto anda ada di media itu sudah bisa dikenakan hukum. Tapi ini penyidik lebih paham tentang itu, seperti apa strategi pasal untuk menentukan itu," jelas Saut.

Saut menegaskan agar pimpinan KPK kedepannya dapat menerapkan Pasal 36 No.30 Tahun 2002 dengan baik. Menurutnya Pasal 36 tersebut lah yang kerap menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi. (wid,rls, ist/dya)

PASAL-PASAL YANG MENJERAT FIRLI

UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 65 KUHP

● Pasal 12e

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

● Pasal 12B

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

● Pasal 65 KUHP

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

